



STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

Fransiskus Wonda Mete¹, Cahyo Sasmito², Eri Yusnita³,
Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
fransiskuswm15@gmail.com¹, cahyosasmito@gmail.com², yusnitaarvianti@yahoo.co.id³

Naskah diterima: 26 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



Abstract

This research was conducted to find out the Government's programs and strategies in community empowerment efforts, at the community and village empowerment offices in Malang Regency, in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional Government is the administration of government affairs by the regional government and regional people's representative councils according to the principle of autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy. This research was conducted at the community empowerment service and Malang district villages using qualitative descriptive. The determination of informants was carried out using a purposive sampling technique and then the data found was analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study show that the government's strategy in community empowerment efforts at the community empowerment service and Malang district villages as a whole has been running effectively. But there needs to be continuous improvement so that what the government hopes for can be realized. The supporting factor is the existence of good cooperation between the village apparatus and the community itself.

Keywords: Strategy, Empowerment, Community.

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Tribhuwana Tunggadewi
E-mail: fransiskuswm15@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan lembaga atau Instansi organisasi pemerintahan yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengatur sebuah sistem pemerintahan dan menetapkan aturan untuk mencari suatu tujuan dan cita-cita lembaga organisasi pemerintah atau suatu Negara.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah merupakan suatu sistem yang menjalankan wewenang atau kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian bagiannya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pelimpahan atau pemberian kekuatan (Power) yang akan menghasilkan hirarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan. Pemberdayaan mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus tujuan (people centre). Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah mencoba untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang makna dan tujuan pembangunan. Masyarakat didorong bersedia untuk belajar memahami beragam hal yang mempengaruhi dampak pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan. Adrianus Sodi Liwu; Cahyo Sasmito (2019).

Secara umum Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan disini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya. Adapun tujuan dari Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang sosial maupun ketrampilan kepada masyarakat. Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang dengan teknik kualitatif. penentuan informan 1 orang sekretaris dan 4 orang kepala bidang dengan teknik purposive Sampling, Instrumen penelitian berupa interview Guide, catatan observasi dan peneliti sendiri. Data yang ditemukan peneliti dilapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan atau keakuratan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dilakukan menggunakan teknik triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang.

Teori Komponen strategi dan tipe strategi Menurut Salusu 2015:70. Menjelaskan tentang komponen strategi dan tipe strategi bahwa suatu strategi yang telah dibuat tidak akan berhasil tanpa ada strategi yang efektif. Ukuran keberhasilan dari strategi dapat ditentukan dari keterlaksanaan Implementatornya. Dalam Teori ini salusu menyarankan dalam implementasi strategi pemberdayaan masyarakat berjalan efektif harus memenuhi komponen strategi dan tipe strategi pokok sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi
2. Program Pemerintah
3. Tujuan dan Sasaran.
4. Lingkungan.

5. Kemampuan
6. Kompetisi.
7. Pembuat strategi.
8. Komunikasi.

1. Strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Strategi pemerintah dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pelimpahan atau pemberian kekuatan (Power) yang akan menghasilkan hirarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan. Pemberdayaan mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus tujuan (people centre). Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah mencoba untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang makna dan tujuan pembangunan. Masyarakat didorong bersedia untuk belajar memahami beragam hal yang mempengaruhi dampak pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan.

Andi 1 (2010) berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode analisis data melalui proses triangulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Strategi utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi menuntut adanya inovasi dalam manajemen pembangunan Kabupaten Bekasi, dan sinergi berbagai potensi sumberdaya dan unit organisasi pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. Namun Masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh Program.

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan baik melalui wawancara, observasi dan dukumrntasi tentu berbeda tentang strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat studi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang. Program pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten malang tidak hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi saja tetapi ada program-program lain yang mengarah kepada peningkatan sumber daya masyarakat dan lain sebagainya.

2. Program pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan.

Dalam merencanakan atau mengkonsepkan sebuah program dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang terlebih dahulu melaksanakan rapat kordinasi internal mereka dan menyatukan ide dan gagasan untuk membuat program, yang kemudian dilanjutkan pembuatan program-program untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun program-program yang ada pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Program usaha ekonomi masyarakat.
2. Program pengembangan potensi desa.
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
4. program pelayanan administrasi perkantoran.
5. program peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
6. Bimtek
7. Workshop manajemen keuangan bumdes.
8. Workshop pemanfaatan teknologi.

sehinga Program-program kerja yang ada di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten malang sangat membantu pihak aparatur desa dan tentunya kepada masyarakat di setiap desa kabupaten malang.

3. Tujuan dan Sasaran Strategi pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan merupakan keinginan yang ingin dicapai dalam waktu yang telah ditentukan, relatif tidak mengenal batas waktu. Sementara sasaran sesuatu yang telah mengarah pada kegiatan untuk mencapai tujuan. Sasaran lebih terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dihitung secara terus menerus. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang, mempunyai tujuan yang baik untuk masyarakat, tentu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang juga selalu memberikan bimbingan kepada pemerintah desa maupun masyarakat untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Tentu kemenderian bertindak, berfikir, dan mengendalikan apa yang masyarakat lakukan. Sasarannya lebih kepada masyarakat yang kurang berdaya atau tidak berdaya. sehinga dengan adanya bimbingan kepada aparatur desa dan

masyarakat akan sangat membantu mereka dari segi pengetahuan dan pada akhirnya masyarakat punya kreatif untuk mengembangkan diinternal mereka.

4. Kesiapan masyarakat dilingkungan atau Internal terhadap Strategi pemerintah dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat.

Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain, dimana lingkungan mampu mengubah sasaran dan sebaliknya sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungan. Dalam peluang terdapat dua lingkungan yaitu lingkungan makro yang merupakan masyarakat luas dan lingkungan mikro yang mana terdapat dalam tubuh organisasi. kesiapan lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat sangat terbuka, asalkan ada kordinasi dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat, dalam hal ini Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang telah berupaya menjalin komunikasi dan kordinasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat, kerja sama yang baik akan menghasilkan sebuah hasil yang baik, dan tentunya bisa dipastikan segala program pemerintah dari atas sampai dibawah semua bisa terakomodir, dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah, sehingga lingkungan sangat berpengaruh kepada tingkat kesadaran masyarakat maupun dari partisipasi masyarakat. ada beberapa masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang baik, sehingga dalam menjalankan program tingkat desa itu berjalan dengan baik. Namun kendala yang sering ditemukan oleh pemerintah yaitu kesiapan lingkungan atau masyarakat masi sangat kurang dikarenakan banyak juga masyarakat yang bekerja jadi agak kesulitan, sehingga kami harus mempunyai strategi untuk masyarakat yang tidak terlibat, pada saat ada kegiatan-kegiatan di desa. dengan cara memilih waktu yang tidak bertabrakan dengan pekerjaan masyarakat. Bahkan kami adakan rapat dimalam hari.

5. Potensi Atau kemampuan Internal dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten malang.

Potensi Merupakan gambaran apa yang dibuat dalam organisasi tersebut, karena seluruh kegiatan fokus pada kekuatan Lembaga. Dinas pemerdayaan masyarakat dan desa kabupaten malang, dengan adanya pegawai-pegawai yang suda banyak berpengalaman dibidang pemerintahan mereka sangat cepat untuk bisa menyesuaikan apa yang menjadi kendala dan hambatan dimasyarakat. tentu dengan segala strategi dan upaya pemrintah itu sendiri, sehingga mereka bekerja sesuai tugas dan fungsi dan yang pastinya sesuai peraturan yang ada yaitu uandang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang No 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyaraka, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prnsip-prinsip demokras, pemertaan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik indoesia. Potensi yang ada di desa tentu ada beberapa desa wisata, yang saat ini pemerintah Kabupaten Malang terus kembangkan dan memfasilitasi dari segi pendampingan kepada aparatur desa dan kepada masyarakat itu sendiri.

6. Pembuatan Strategi dalam upaya pemberdayan masyarakat

Dalam sebuah organisasi atau lembaga tentu mempunyai strategi pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dari situ akan tau siapa yang kompeten dalam membuat strategi untuk kelangsungan suatu organisasi. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang telah berupaya dalam menyusun strategi, tentunya seluruh pegawai internal dinas pemberdayaan masyarakat dan desa turut terlibat tanpa terkujuali, dan juga Lembaga Kemasyarakatan desa turut terlibat pada saat rapat kordinasi untuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang akan dikerjakan. Pembuatan strategi seluruh pegawai internal Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang semuanya terlibat, dan disitulah mengambil keputusan bersama untuk melaksanakan program kerja.

7. Pola Komunikasi pemerintah terhadap masyarakat.

Faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Dari hasil Wawancara dan dukumentasi, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang selalu berupaya untuk membangun komunikasi yang baik pihak internal dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten malang dan lembaga kemasyarakatan desa.pada saat mau melaksanakan kegiatan tentunya terlebih dahulu malakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada aparatur desa, sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada halangan, dan pastinya banyak masyarakat yang terlibat karena kita mensosialisasikan dari jauh hari, contoh pada saat ajang pelantikan kepala desa, terlebih dahulu ada rapat kordinasi persiapan pelantikan kepala desa terpilih.dan pada saat ada kegiatan-kegiatan di desa.

8. Faktor pendukung dan penghambat Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Faktor pendukung dan penghambat yang peneliti temukan lewat, wawancara bersama informan yaitu sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- a. Kerja sama yang baik pihak internal dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada pihak desa dan kepada masyarakat.
- c. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selalu mengontrol dan mengevaluasi setiap program.
- d. Masyarakat yang antusias dalam melaksanakan gotong royong.

Faktor penghambat:

- a. Kurangnya pemahaman kepada lembaga kemasyarakatan. sehingga pihak dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa selalu mengadakan pembinaan.
- b. kurangnya partisipasi masyarakat dimasa pandemi covid19.
- c. Minimnya pengetahuan pada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa "Strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang menunjukkan secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif, namun perlu ada peningkatan intensitas pengelolaan seperti pengembangan pada berbagai aspek sumber daya, penyelenggaraan pendampingan dan kegiatan bermanfaat untuk menunjang aktivitas pengembangan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperlihatkan oleh rata-rata jawaban responden mengenai Strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik yaitu mulai dari tahap pendampingan dari pemerintah desa kepada masyarakat.

REFERENSI

- Allison, Michael dan Kaye, Jude. 2013. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Agustino. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Assauri, Sofjan. 2010. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep & Strategi*. Jakarta
- Azizah, R. N., Zauhar, S., & Soeaidy, M. S. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang*. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(03), 203–2012.
- David, Fred R, 2011. *Strategic Management, Buku 1*. Edisi 12 Jakarta
- Donnelly.1996. *Organisasi, perilaku, struktur, proses*. Bina rupa aksara. Jakarta.
- Daison, P. R. K. D., Arvianti, E. Y., & Sa'diyah, A. A. (2014). *Pemberdayaan Wanita Pada Dua Kelompok Ibu Rumah Tangga Bhakti Luhur Dan Sekarwangi Dalam Membantu Peningkatan Pendapatan Keluarga*. *Buana Sains*, 14(1), 1–10.
- Effendi, A. D., Barkey, R., & Jamil, M. H. (2014). *Strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat pada Model Desa Konservasi di Taman Nasional Taka Bonerate*. *J. Sains & Teknologi*, 14(2), 151–161.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC:Congressional Quarterly Press.
- Hadi, D. P. (2015). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus Di Pnpm-Mp Kabupaten Kendal)*. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(1), 725–736.
- Hamel,dan Prahalad, C, K, 1995. *Kompetisi Masa Depan*. Jakarta : PT.Bina Rupa Aksara.
- Internasional, J., Politik, I., Publik, K., Risaad, M., Syafari, R., Sompa, A. T., Budhi, S., & Yunani, A. (2021). *Machine Translated by Google Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet Budidaya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru* Machine Translated by Google. 2.

- Kutoarjo Kabupaten Purworejo). *Journal Of Non Formal Education and Community Empowerment*, 2(2), 15–21.
- Liwu, A. S., & Sasmito, C. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *JISIP - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 228–233.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Murniati Ar, dan Nasir Usman, 2015 .“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.
- Mudana, I. W. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 598–608.
- Marrus. 2002 . *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prihantoro, S. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Pelatih-, M., Kewirausaha-, A. N., & Malang, M. I. (2022). *Terdampak Covid an Frozen Food Di*.
- Sjafrizal. (2009) *Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah*. Baduose Media
- Salusu, 2015 *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Sopandi, A. (n.d.). *Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bekasi*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Tjilen, A. P., Asang, S., Rusdi, M., & Kemiskinan, P. (2015). Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat “ Rencana Strategis ” Pengembangan Masyarakat (RESPEK)” (Studi Kasus Di Kecamatan Sota Merauke). 4, 356–360.
- Umar, 2011, *Riset Pemasaran dan perilaku konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Widianto, R. I. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas*.
- Yunus, Eddy, 2016 *Manajemen Strategis*, Andi, Yogyakarta
- <https://www.medcom.id/nasional/daerah/yKXPQEOK-jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-malang-mencapai-10-5>.(https://radarjember.jawapos.com/berita_jember/21/07/2022/kemiskinan-masih-jadi-masalah-klasik)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah